



ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP

BANK PEMBANGUNAN ISLAM

STRATEGI KEMITRAAN DENGAN REPUBLIK INDONESIA 2011-2014

PENDAYAGUNAAN POTENSI DAERAH



daya keuangan di bawah payung dua dari empat bidang Bidang Lintas Sektor, yaitu: (i) memanfaatkan sektor keuangan syariah, dan (ii) mobilisasi kemitraan. Secara khusus, IDB Group akan mengoptimalkan pemanfaatan pengetahuan institusionalnya (institutional knowledge) untuk mendukung percepatan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia melalui pengembangan arsitektur keuangan syariah, termasuk upaya untuk lebih memperdalam pasar modal syariah.

Untuk mendukung pelaksanaan program MCPS di Indonesia, maka program MCPS juga akan memanfaatkan platform kemitraan untuk menarik minat donor bilateral dan FDI (terutama dari Kawasan Negara-Negara Teluk/GCC), dan melalui pembiayaan bersama (co-financing) dengan bank-bank pembangunan multilateral lainnya. Selain itu, berbagai kegiatan dalam pengembangan kapasitas (capacity development), termasuk hubungan timbal balik (reverse linkages), diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan program MCPS dan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan praktek terbaik (best practices) antara Indonesia dan negara-negara anggota lainnya.

Indikasi Pembiayaan dan Faktor-Faktor Utama yang Diperlukan bagi Kesuksesan MCPS

Pagu indikatif pembiayaan untuk MCPS periode 2011-2014 diperkirakan berada di kisaran USD 3 - 3.3 miliar. Sebesar 64% dari pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk membiayai program-program di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar sepertiga dari total pembiayaan indikatif tersebut diharapkan berasal dari anggota Group IDB yang khusus membiayai sektor swasta. Pagu pembiayaan indikatif ini akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan program kerja tahunan. Perlu dicatat bahwa pada akhirnya besarnya pagu pembiayaan akan ditentukan oleh kebutuhan pemerintah, ketersediaan proyek-proyek yang bankable, dan juga oleh pagu resiko IDB sendiri.

Peningkatan jumlah pagu operasional yang cukup ambisius ini sangat tergantung pada sejumlah faktor penggerak (enabling factor) dan pendukung (supporting factor), baik dalam hal kebijakan maupun operasional. Salah satu faktor kunci yang akan mendukung kesuksesan pelaksanaan program kerja MCPS ke depan adalah pendirian Kantor Perwakilan (Country Office) IDB di Indonesia. Prasyarat ini sangat diperlukan karena adanya kebutuhan untuk menangani proses pembangunan yang kompleks dan terdesentralisasi di Indonesia dan persaingan yang ketat dengan donor lain yang telah mendirikan Kantor Perwakilan sendiri, dan juga perlunya monitoring proyek secara ketat. Selain itu, dibutuhkan penyelarasan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nasional Indonesia dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa IDB (IDB Procurement Guidelines) dan perlunya meningkatkan bantuan teknis (technical assistance) kepada instansi-instansi pemerintah dalam mempersiapkan proyek-proyek yang layak bank (bankable projects).

Dapat disimpulkan, bahwa melalui proses penyelarasan yang cermat, selektifitas, dan focus pada berbagai prioritas dan Strategi Perencanaan Regional Tahap Kedua, dan juga konsultasi dengan para pihak pemangku kepentingan, maka kerangka MCPS yang menggabungkan Empat Pilar dan Empat Bidang Lintas Sektor diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan utama dan mendukung berbagai akselerator pertumbuhan di tingkat regional dengan memanfaatkan potensi setempat guna mencapai pertumbuhan yang seimbang dan inklusif di Indonesia. Dalam merealisasikan hal tersebut, IDB Group juga akan memanfaatkan segala peluang demi meningkatkan peran intermediasi keuangan syariah, dimulai dari memperluas akses masyarakat miskin pada pembiayaan mikro sampai dengan memobilisasi sumber daya melalui instrumen-instrumen keuangan jangka panjang. Platform Kemitraan juga akan dioptimalkan untuk menarik investasi luar negeri dalam berbagai sektor pembangunan infrastruktur utama, perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dan sektor keuangan. Platform ini juga akan dipergunakan untuk mendukung hubungan timbal balik (reverse linkages) melalui transfer keahlian Indonesia untuk memperluas dampak pembangunan di negara-negara anggota lainnya.

Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang luas, terdiri dari sekitar 17,508 pulau dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa. Melalui hubungan perdagangan, Islam datang di belahan utara Sumatera pada awal abad ke 13. Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari pendudukan Jepang di tahun 1945 seiring dengan usainya Perang Dunia II. Sebelumnya Indonesia merupakan koloni Belanda. Kini, secara administratif, Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terbagi ke dalam 7 wilayah.

Selama lima dekade terakhir, Indonesia berhasil melewati periode ketidakstabilan politik menuju demokrasi, desentralisasi dan perekonomian yang bebas. Stabilitas politik selama 10 tahun terakhir juga telah ditandai dengan reformasi demokrasi, kelembagaan dan ekonomi yang terkonsolidasi dengan cepat. Sebagai anggota ASEAN dan G20, kekuatan politik dan ekonomi Indonesia saat ini semakin dirasakan mewakili suara Negara Muslim di kancah internasional dan regional.

IDB Group memulai kegiatannya di Indonesia pada tahun 1976 dengan membiayai proyek-proyek pembangunan di sektor publik yang didanai dari sumber modal IDB sendiri (ordinary capital resources/ OCR), pembiayaan sektor swasta, dan pembiayaan untuk perdagangan internasional (ekspor/impor). Hingga kini, total pembiayaan IDB Group di Indonesia adalah sekitar USD 2 miliar, dengan alokasi dari IDB-OCR sekitar 58% dan pembiayaan perdagangan sekitar 42%. Secara regional, pembiayaan IDB-OCR lebih besar dimanfaatkan untuk proyek-proyek di Jawa, Bali dan Sumatera; sedangkan secara sektoral, lebih banyak ditujukan untuk pendidikan tinggi, kemudian diikuti oleh sektor pertanian dan transportasi.

Tantangan Utama Pembangunan

Dengan posisi keuangan publik dan cadangan devisa yang kuat, Indonesia telah mampu menghadapi badai krisis keuangan global dengan stimulus fiskal yang memadai. Setelah mengalami stagnasi di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5.8% pada tahun 2010 dan ditahun-tahun selanjutnya diharapkan kembali ke tingkat pertumbuhan yang normal (> 6%). Dalam jangka menengah, kualitas pertumbuhan tersebut diharapkan akan terus meningkat terutama melalui 2 cara yaitu, (i) pertumbuhan yang seimbang (balanced growth) dalam pembangunan ekonomi regional / daerah, dan (ii) inclusive growth, dalam hal peningkatan kesempatan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Pada umumnya, indikator sosial masyarakat Indonesia adalah mirip dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan kelompok negara-negara menengah bawah (low-middle income countries) lainnya. Pengurangan tingkat kemiskinan telah terjadi secara berlanjut. Jika dibandingkan dengan negara sesamanya, kemiskinan ekstrim di Indonesia berada pada tingkat yang cukup rendah. Namun demikian, proporsi penduduk yang rentan dan miskin secara kronis di Indonesia relatif lebih besar dibanding dengan Negara lain yang setaraf. Untuk menghadapi kerentanan ini diperlukan upaya pengembangan keterampilan untuk masyarakat miskin khususnya di daerah pedesaan.

Kecuali ada upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan utama pembangunan, Macroeconomic outlook yang sudah baik dapat terganggu, dan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap Kedua (meliputi periode 2010 – 2014) bisa menjadi tantangan yang sangat berat. Pembiayaan investasi berbasis PPP untuk merehabilitasi dan membangun sarana infrastruktur modern di Indonesia, tampaknya menjadi strategi yang menjanjikan sebagai pondasi



Group IDB akan mengoptimalkan platform kemitraan untuk menarik donor dan penanaman modal asing (khususnya dari Kawasan Teluk) guna mendukung program MCPS.



Total pembiayaan untuk periode 2011-2014 diperkirakan antara US\$3 - 3,3 milyar.





pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, kelemahan kapasitas kelembagaan, kesulitan dalam penyediaan lahan dan keterbatasan jumlah tenaga kerja terampil telah membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan dimotori oleh kegiatan investasi.

Pengurangan kesenjangan ekonomi regional merupakan tantangan yang paling penting dalam mempertahankan stabilitas politik dan sosial. Yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan agar dapat memberikan manfaat besar secara spasial (regional) dan juga memperbaiki distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata telah menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan pada berbagai indikator sosial ekonomi. Untuk wilayah di luar Jawa-Bali, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan volatilitas yang relatif tinggi. Arus investasi yang tidak merata merupakan salah satu alasan utama tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Dengan demikian, tantangan utama selama periode Rencana Tahap Kedua adalah untuk mendorong kegiatan investasi di wilayah luar Jawa – Bali dengan membangun infrastruktur dan lingkungan yang mendukung kegiatan dunia usaha.

Memperbesar Peluang

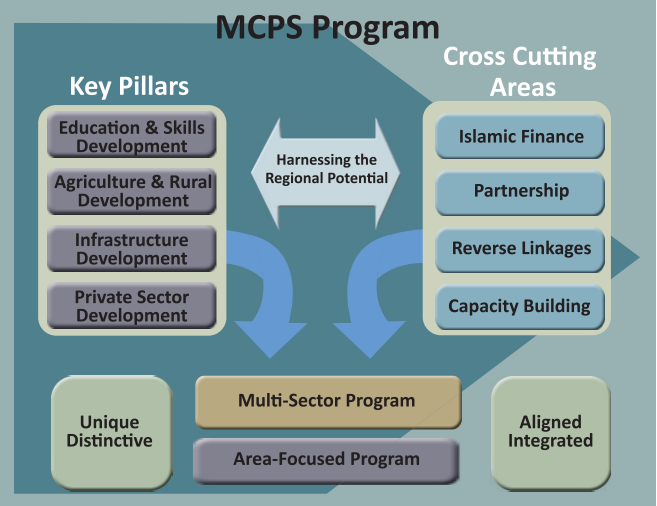
Bagi para mitra pembangunan, kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sangat luas mengharuskan mereka untuk menjadi sangat selektif ketika menentukan lokasi geografis aktifitas pembangunan yang akan mereka dukung. Indonesia telah mengalami bermacam tantangan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik dan sosial, yang sebagian besar terjadi karena parahnya kesenjangan sosial - ekonomi antar daerah. Lebih jauh lagi, keterbatasan secara fisik pulau Jawa dan Sumatera sebagai pusat perekonomian, telah mendorong kekuatan sentrifugal perekonomian yang menyebabkan berkembangnya urbanisasi di kawasan Indonesia lainnya. Sasaran dari Rencana Tahap Kedua adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dengan memperluas dan memperdalam konektivitas perdagangan dan transportasi antar daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah juga mendorong lokalisasi ekonomi dengan investasi yang terfokus pada pendayagunaan sumber daya alam daerah. Kebijakan pemerintah RI ini semestinya juga dapat mendorong aglomerasi ekonomi dimana akses kepada sarana produksi menjadi lebih efisien dan rendah biayanya – sehingga dapat menarik minat sektor swasta untuk menanamkan modal mereka dalam rangka merespons kecenderungan urbanisasi dan perluasan pasar.

Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, akses Indonesia untuk pembiayaan formal terbilang cukup layak. Namun demikian, walaupun terdapat lingkungan politik dan ekonomi yang sangat kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, peran intermediasi keuangan masih tetap lemah. Pertumbuhan tahunan dari total asset institusi dan lembaga keuangan syariah, selama tahun 2006 - 2008, berkisar antara 29% – 37%. Namun, secara relatif, asset bank-bank syariah hanya merupakan 2.4% dari total asset sektor perbankan. Dalam jangka pendek hingga menengah, terdapat sejumlah peluang untuk meningkatkan intermediasi keuangan syariah di Indonesia seperti pendalaman keuangan melalui pengembangan model-model pembiayaan syariah dan peningkatan efisiensi agar menjadi lebih kompetitif; membangun bank-bank syariah dengan modal dasar yang lebih kuat untuk lebih meningkatkan ketahanan mereka terhadap guncangan di sektor riil, meningkatkan kualitas infrastruktur pengawasan, mengembangkan keterampilan dan SDM, dan pengembangan pasar modal syariah, khususnya dalam konteks penerbitan Sukuk jangka panjang yang sangat dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur berbasis PPP.

Validasi Strategi Kemitraan (MCPS) Melalui Konsultasi Regional

Keseluruhan program MCPS didasarkan pada azas penyelarasan dan selektifitas dengan dan dalam konteks Strategi dan Prioritas Regional Tahap Kedua yang meliputi wilayah Jawa-Bali (yang disebut sebagai Program Tingkat Nasional) dan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (yang disebut sebagai

Program Tingkat Regional). Fokus pencapaian tersebut dipandu oleh empat pertimbangan yang saling terkait, yaitu: (i) penyebaran geografis dan jumlah investasi yang dibutuhkan, (ii) identifikasi berbagai kendala yang ada, berdasarkan studi diagnostik, di dalam Core Engagement Areas, (iii) identifikasi mekanisme penyaluran produk pembangunan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan, pembiayaan, dan kemitraan, dan (iv) proses konsultasi dengan para pihak pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan.



Diagnosis atas pertumbuhan, kemiskinan, tingkat kendala sektoral dan prioritas, telah dilakukan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Hasil utama dari diagnosa tersebut adalah bahwa kesenjangan antar daerah di Indonesia tidak dapat diatasi dengan hanya menyandarkan kegiatan ekonomi pada sumber daya alam di daerah; tapi kebijakan yang mendukung dan investasi publik yang cukup juga dibutuhkan dalam rangka menyediakan akses yang murah kepada prasarana utama (seperti listrik, tenaga kerja terampil) dan membangun konektivitas antar daerah yang sangat efisien untuk menarik munculnya industri-industri baru.

Berdasarkan diagnosa atas kendala-kendala di atas, pemetaan antara Prioritas Regional Rencana Tahap Kedua dan prioritas IDB Group, focus pada Empat Pilar and Empat Bidang Lintas Sektoral yang dikembangkan selama proses formulasi Strategi Kemitraan (MCPS) ini diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan di daerah.

Dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan, 5 (lima) lokakarya IDB dan Pemerintah RI telah diselenggarakan dalam bulan September 2010. Pembukaan dan Lokakarya Nasional diadakan di Jakarta, sementara 3 (tiga) lokakarya regional diadakan di Palembang (Sumatera Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Manado (Sulawesi Utara). Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk membangun pemahaman bersama dengan para pemangku kepentingan dalam penyeleksian dan fokus terhadap berbagai peluang yang terkandung dalam Strategi Pertumbuhan Regional dengan Prioritas IDB Group, dan untuk mengapresiasi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta menggali potensi kerjasama dengan mitra-mitra pembangunan lainnya.

Program MCPS mendukung peluang pembangunan di daerah, terutama di bidang-bidang yang sangat diperlukan, seperti pembangunan konektivitas antar daerah yang tingkat efisiensinya tinggi, pembangunan perkotaan yang terfokus pada pasar tanah perkotaan yang terorganisir dengan baik, penyediaan jaringan dan distribusi air; pencapaian swasembada dan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian dan pedesaan; dan pengembangan sektor swasta, khususnya UKM melalui penyediaan akses berbiaya rendah kepada berbagai prasarana utama, seperti pengembangan keterampilan tenaga kerja, listrik, dan pembiayaan perdagangan/investasi.

Dengan memanfaatkan pengalaman sukses dan pembelajaran masa lalu, Program MCPS lebih jauh diharapkan dapat diperluas dengan pemanfaatan sumberdaya pengetahuan (knowledge) dan sumber

Sasaran dari Program Kemitraan (MCPS) ini adalah untuk mendukung peluang pembangunan yang sedang muncul di luar kawasan Jawa-Bali, dengan memusatkan perhatian pada konektivitas antar kawasan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang efisien.

Ada banyak peluang untuk meningkatkan peran intermediasi dari lembaga keuangan syariah di Indonesia.

